DAFTAR PUSTAKA

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

Christia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 149–163.

Endah, Kiki. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 5 No 1, No. 150 (2018): 76–82.

Enggarani, Nuria Siswi, Arief Budiono, Achmad Miftah Farid *"Hukum Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan"* (2025) Hal.13

Fauzi A. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–136.

Femilia, Yessyca, dan Uu Nurul Huda. "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 121–140.

Fitriyanto, Doni Siti Umalikah1, "Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di desa-desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Friedman,L. M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif limu Social* (Bandung: Nusa Media)

Handraini, Helti, Aldri Frinald, dan Lince Magriasti. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di

Indonesia." *Jurnal komunikasi & Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 601–608.

Jawardi 2016, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum," *Jurnal Penelitain Hukum De Jure:* 77-93.

Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.

Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–145.

Kusnadi, Iwan Henri. "Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Registrasi Penduduk Menurut Tingkat Migrasi Penduduk Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang." *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 1 (2019): 24–32..

Lalan Rojulan, "Upaya Perlindungan Dan Mitigasi Bencana Di Desa Kore Kecamatan Sanggar" 13, no. Mdcm (2024).

Magriasti, Lince Novindia Ayu Lestari, "Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 6259–6260.

Mauliddiyah, Nurul L. "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)." *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.2* 2, No. 2 (2021): 6.

Moch.Faizal Mustofata,Afifuddin, Hayat. "Evektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik (Studi Pelayanan KK , KTP / E-KTP Dan Akta Kelahiran Di Kelurahan Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan." *Jurnal Respon Publik* 14, no. 3 (2020): 14–26.

Mozin, Sri Yulianty, dan Rusli Isa. "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 4 (2023): 150–155.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189.

Novindia Ayu Lestari, Lince Magriasti. "Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 6259–6260.

Nurul L Mauliddiyah, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa)," *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.2* 2, no. 2 (2021

Pratiwiningsh, Theresia 2020, "Nilai Kearifan Ungkapan Budaya Jawa 'Rukun Agawe Santosa Dalam Gagasan Pemikiran Emmanuel Levinas," Jurnal Ilmu Badaya.

Redaksi Pustaka Makmur, UUD 1945 dan Amandemen, edisi Reshuffle, Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Rinto, Muh, Amir Muhiddin, dan Ansyari Mone. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 24–37.

Riswandha Imawan, Dampak Pembangunan nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah. Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta .1991

Rojulan, Lalan. “Upaya Perlindungan Dan Mitigasi Bencana Di Desa Kore Kecamatan Sanggar” 13, no. Mdcm (2024).

Sagita, Novie Indrawati. “Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandung.” *Agregasi* 4, no. 2337 (2016): 126.

Saidin, Saidin, Astri Mardini Wati, dan Rekha Adji Pratama. “Fungsi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan : Studi Desa Alebo Kecamatan Konda.” *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal* 4, no. 1 (2024): 63–74.

Sarana dan Prasarana: Definisi, Fungsi, Ruang Lingkup serta Contohnya. https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/142001469/sarana-dan-prasarana-definisi-fungsi-ruang-lingkup-serta-contohnya diakses pada 18 april 2025 pukul 10.45

Sari, Diana Ana. “Makna Agama dalam Kehidupan Modern.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): 16–23.

Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Rabu, 26 Maret 2025, Pukul 09:00 WIB

Sesse, Muh. Sudirman 2013, "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum Diktum Vol 11, N.

Siti Umalikah1, Doni Fitriyanto2. “Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di desa-desa Kecamatan Pakel Kabupaten

Tulungagung.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Sugiman. “Pemerintah Desa.” *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 84–85.

Suyono, Djoko, dan Rismanto Rismanto. “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.” *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 2 (2019).

Soekanto, Soerjono, 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40.

Soekanto, Soerjono Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal.80

Soekanto, Soerjono, 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

———, 2008. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

. ———, 1983. Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.

Tata, D A N, dan Kerja Sotk. “Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Membangun Kesadaran Memahami Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (STOK) Abdul.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 3 (2024): 62–70.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Universitas, Dosen, Muhammadiyah Sumatera, Dosen Universitas, dan Muhammadiyah Sumatera. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar." *Volume 14* 14 (2020): 564–584.

Usman, Sabian Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

Widjaja, Haw, Otonomi Desa, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2008, hlm. 165.

Zakaria, Y. Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, (Jakarta: LP3S,), Hlm. 4

"Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia Halaman 1," *Kompasina.Com.*

"Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa"